

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang kesehatan keuangan Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Buku :

Amrih, I. D. (2020). Hukum Kepailitan Karakteristik Renvoi Prosedur dalam Perkara Kepailitan. Yogyakarta: Laksbang Justitia.

Arif, M. N. (2015). Pengantar Ekonomi Syariah. Bandung: Pustaka Setia.

Asyhadie, Z. (2005). Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Darmawi, H. (2001). Manajemen Asuransi. Jakarta: Bumi Aksara.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, S. (1989). Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Endang, M. S. (2013). Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian). Bandung: Alumni.

- Fuady, M. (1999). *Hukum Pailit 1998: Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ganie, A. D. (2011). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono, S. R. (1995). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iar, R. S. (1976). *Hukum Dagang I dan II*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Indroharto. (1984). *Rangkuman Asas-asas umum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ismanto, K. (2009). *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartono. (2000). *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lontoh, R. A. (2001). *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Jakarta.
- Ngani, A. I. (1985). *Profil Hukum Perasuransian di Indonesia*. Yogyakarta: Liberti.
- Prodjodikoro, W. (1987). *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Intermasa.
- Purwosutjipto, H. M. (1986). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Remy, S. (2010). *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Remy, S. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: memahami UU No. 37 Tahun 2004*. Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, U. H. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: NFP Publishing.
- Shubhan, M. H. (2008). *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sinaga, S. M. (2012). *Hukum Kepailita Indonesia*. Jakarta: Tatanusa.

soekarso, V. S. (1994). Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti, R. (1995). Pokok-Pokok Hukum Dagang. Jakarta: Intermasa.

Surayatin, R. (1983). Hukum Dagang I dan II. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sutedi, A. (2009). Hukum Kepailitan. Bogor: Ghalia Indonesia.

Usman, R. (2004). Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Widjaja, A. Y. (1999). Seri Hukum Bisnis Kepailitan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Yuhassarie, E. (2004). Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.

Jurnal :

Rosiani Niti Pawitri, Kedudukan Dan Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pada Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Vol XXIII, 2017.

I Ketut Artadi, Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian, Udayana University Press, Denpasar, 2014.

Wahyuni Widiawati, Permono, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Yang Pailit Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Vol.1 No.1, 2020.

Internet :

<http://asuransime.com/pengertian-polis-asuransi-menurut-para-ahli-danfungsinya/>

<https://www.cermati.com/artikel/mengenal-sejarah-dan-perkembangan-asuransi-di-indonesia>

<https://www.allianz.co.id/explore/yuk-mengenal-berbagai-macam-perusahaan-asuransi-di-indonesia.html>

<https://panfic.com/id/insurance-knowledge/prinsip-dasar-asuransi/>

<http://thelawdictionary.org/mark/>

<https://www.pelatihanprofitinternasional.com/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-dihukum-ojk/>

<https://finansial.bisnis.com/read/20200814/215/1279438/kronologis-kresna-life-dari-gagal-bayar-klaim-hingga-kartu-merah-ojk/3>

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201217163423-17-209859/pkpu-kresna-life-dikabulkan-nasabah-sedih-bahkan-depresi>.

<https://keuangan.kontan.co.id/news/belasan-korban-kresna-life-melapor-ke-polisi>.

